

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik Indonesia dalam konflik Laut China Selatan Blok-Natuna tidak dapat lepas dari rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi dalam Nawacita poin pertama menegaskan misinya akan menghadirkan negara dalam rangka melindungi bangsa (termasuk rakyatnya) dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas dan aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan pertahanan dilandasi kepentingan nasional, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berlandaskan pada ideologi Pancasila dan mempunyai filosofi Trisakti berdasarkan pemikiran Soekarno. Politik luar negeri Indonesia dalam konflik Laut China Selatan terutama Blok-Natuna berdasarkan penelitian, dapat dikelompokkan ke dalam 4 pendekatan, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi, dan pendekatan kerja sama ekonomi.

Pendekatan Geopolitik yang dilakukan pemerintah Jokowi dilakukan dengan konsep dasar hubungan politik dengan geografis Indonesia. Indonesia tepat berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi. Indonesia sebagai negara maritim telah menegaskan sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua

samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Doktrin Poros maritim Dunia terdiri dari lima elemen. Elemen pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Elemen kedua, yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan laut melalui pengembangan industri perikanan. Elemen ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Elemen keempat, melakukan diplomasi maritim yang bertujuan menghilangkan berbagai sumber konflik di laut. Elemen kelima, membangun kekuatan dan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim.

Pendekatan pertahanan dan keamanan dalam politik luar negeri Indonesia atas konflik Laut China Selatan Blok-Natuna bukan merupakan opsi yang utama, namun sebagai negara poros maritim dunia, harus mampu menunjukkan kekuatan militernya dalam menjaga kedaulatan wilayah. Jokowi meningkatkan anggaran militer Indonesia secara bertahap dengan tujuan utama untuk memperbarui alutsista yang ada serta menambah alutsista yang kurang. Pembangunan pangkalan militer juga diperlukan pada batas-batas negara serta wilayah-wilayah yang rentan terjadi konflik, kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban yang mengancam wilayah dan warga Indonesia.

Pendekatan hukum dan diplomasi dalam konflik Laut China Selatan telah dilakukan Indonesia sejak lama, sejak presiden pertama sampai presiden ketujuh, Presiden Joko Widodo dan sampai saat ini

Indonesia aktif melakukan diplomasi untuk mewujudkan kawasan teritorial yang kondusif dan damai. Indonesia sudah lama dikenal sebagai actor kunci dalam perundingan dan lahirnya berbagai norma ASEAN *Way* dan pembangunan ASEAN seperti pembentukan ASEAN *Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*. Indonesia juga merupakan juru damai atau mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional yang terjadi, seperti konflik Thailand –Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar.

Pendekatan kerja sama ekonomi yang dimaksud dalam konteks penyelesaian konflik Laut China Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerja sama ekonomi untuk mengurangi ketegangan terhadap konflik yang terjadi. Pendekatan ekonomi dilakukan sebagai paradigma baru. Hal ini telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo, setelah ada klaim sepihak dari China atas Blok-Natuna, Joko Widodo bertemu dengan China untuk membicarakan kerja sama ekonomi. Pendekatan-pendekatan tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena dapat saling mendukung dan menguatkan dalam upaya politik luar negeri terkait penyelesaian konflik Laut China Selatan, terutama Blok-Natuna.

Berbagai arah kebijakan politik luar negeri presiden Joko Widodo di atas diyakini telah membawa Indonesia kepada masa “*geopolitics*”. Di mana setiap negara akan berusaha untuk melakukan transformasi baik internal maupun eksternal berdasarkan kepentingan nasional untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh dari berbagai negara lain. Pada hubungan politik dan geografi, Indonesia akan menekankan lautan sebagai kekuatan pada masa depan, baik terkait dengan pertahanan keamanan, ekonomi dan

pengelolaan sumber daya yang ada. Laut menjadi sentral untuk menentukan kebijakan nasional dan internasional. Dengan konsep poros maritim dunia, Indonesia menatap masa depan kejayaan maritim Indonesia di masa yang akan datang.